

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG MASALAH**

Perekonomian Indonesia melibatkan berbagai fase penting yang mencerminkan perubahan dalam aspek politik, sosial, dan budaya negara ini. Perkembangan ekonomi Indonesia dapat ditelusuri sejak era kolonial Belanda, ketika Indonesia dikenal sebagai Nusantara, pusat perdagangan rempah-rempah yang sangat dicari oleh bangsa Eropa. Pada tahun 1997, Indonesia mengalami krisis moneter serius yang menyebabkan depresiasi mata uang, inflasi tinggi, dan krisis keuangan yang parah. Pada puncaknya, pada tahun 1998, terjadi reformasi yang membawa perubahan politik dan reformasi ekonomi yang signifikan. Krisis yang terjadi pada tahun 1996-1997 mendorong pemerintah pusat untuk mengalihkan wewenang pengelolaan keuangan kepada daerah. Langkah ini diambil dengan harapan agar daerah dapat mendanai pembangunan dan layanan publik dengan anggaran mereka sendiri (Azhar, 2008).

Pemerintah pusat menanggapi situasi itu dengan menerapkan kebijakan Otonomi Daerah, yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah atau provinsi dalam mengatur sekaligus mengelola urusan mereka sendiri tanpa intervensi dari pusat (Fitriyanti dan Pratolo, 2009). Kebijakan Otonomi Daerah yang diatur oleh UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999, kemudian diperbarui melalui UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, memberikan kewenangan penuh kepada kabupaten dan kota untuk mengembangkan dan

memajukan wilayah mereka. Kebijakan ini memungkinkan mereka untuk menggunakan dana dan pendapatan daerah untuk meningkatkan APBD.

Jika pemerintah daerah terus mengandalkan keuangan dari dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat, hal ini dapat berdampak negatif pada pelaksanaan program-program pemerintah yang tidak dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Pemda diharapkan bisa mengelolah sumber daya yang dimiliki serta melakukan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga dapat berdampak dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat (Handra & Maryati, 2009).

Pemda memiliki kewajiban untuk mengelola administrasi, melaksanakan pembangunan, serta memberikan layanan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan, guna mewujudkan pemerintahan yang bersih sebagaimana dinyatakan dalam maklumat pelayanan. Hal ini diwujudkan melalui penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang telah diakui. Standar ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2005. Salah satu prinsip dalam Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintah adalah pengungkapan penuh, yang mengharuskan laporan keuangan untuk menyajikan informasi secara lengkap dan berguna bagi pengguna. Informasi ini harus disajikan baik pada halaman utama laporan keuangan maupun dalam catatan atas laporan keuangan (CALK) (Syafitri, 2012).

Pengukuran kinerja termasuk elemen penting dalam pemberian umpan balik terhadap rencana yang telah diterapkan dan menunjukkan fungsi pengukuran

kinerja dalam: (i) Menilai bagaimana program berjalan, (ii) Sebagai alat perbandingan atas layanan yang diberikan, (iii) Sebagai alat komunikasi dengan publik. Selain itu, pengukuran kinerja keuangan daerah juga penting dilakukan karena kinerja pemerintahan daerah di negara ini masih memiliki citra yang buruk. Pernyataan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) mengindikasikan kurangnya transparansi dan akuntabilitas di tingkat pemerintah daerah, yang berakibat pada penilaian kinerja yang rendah. Kinerja pemerintah daerah juga dianggap rendah karena adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dengan banyaknya kasus dugaan korupsi yang sering terjadi dilingkungan pemerintahan. Hal ini menunjukkan pentingnya pengukuran kinerja keuangan daerah.

Informasi yang ada dalam laporan pertanggungjawaban atau LKPD dapat berfungsi sebagai petunjuk yang bermanfaat untuk menilai performa keuangan pemerintah daerah (Jurnawati et al, 2013). Data evaluasi kinerja keuangan yang diperoleh dari laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah, yang diukur berdasarkan anggaran yang telah disusun, menjadi sumber informasi untuk meningkatkan program-program berikutnya dengan tujuan meningkatkan kualitas layanan publik (Sari, 2016).

Kemakmuran suatu negara atau wilayah tergantung pada seberapa besar nilai tambah pendapatan yang dihasilkan dari pengelolaan sumber daya yang dimilikinya. Pertumbuhan positif dalam nilai tambah ini akan menarik minat investor untuk mengalokasikan investasi di negara atau wilayah tersebut. Hal ini kemudian dapat memperbaiki infrastruktur, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

(PAD), dan pendapatan antar pemerintah. Pada akhirnya, hal ini akan meningkatkan belanja modal pemerintah daerah (Simanullang, 2013). Pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel dapat dinilai melalui rasio kemandirian keuangan daerah (Halim, 2013). Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total bantuan dari pemerintah pusat dan pinjaman dari berbagai sumber dapat digunakan untuk mengukur kinerja pemerintahan dalam kegiatan pembangunan dan pelayanan masyarakat, serta untuk mengevaluasi kemampuan daerah dalam mencapai target pendapatan.

Ukuran (*Size*) pemerintah daerah sebagai faktor penting yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan mereka. Saat suatu daerah/entitas memiliki ukuran yang besar, meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas juga berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Ukuran pemerintah daerah dapat diukur melalui beberapa indikator seperti total aset, jumlah pegawai, total pendapatan, dan tingkat produktivitas. Dari beberapa indikator yang ada, total aset dipilih karena memiliki stabilitas nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan, jumlah pegawai, dan total produksi daerah. Menurut Lesmana (2010), Sumarjo (2010), Yulianingtyas (2011), dan Syafitri (2012), total aset digunakan sebagai ukuran utama untuk menilai ukuran pemerintah daerah dimana semakin besar aset yang dimiliki, semakin besar ukuran pemerintah daerah tersebut.

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah disampaikan, peneliti berminat untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, dan *Leverage* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur."

## 1.2 RUMUSAN MASALAH

Berikut adalah rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020-2022 ?
2. Apakah Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020-2022 ?
3. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020-2022 ?

## 1.3 TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menguji dan menganalisis apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020-2022.
2. Untuk menguji dan menganalisis apakah Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020-2022.
3. Untuk menguji dan menganalisis apakah *Leverage* berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020-2022.

#### **1.4 MANFAAT PENELITIAN**

Penulis mengharapkan bahwa penelitian ini secara teoritis dapat memberikan wawasan mengenai sejauh mana Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintahan Daerah, dan *Leverage* mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman yang telah diperoleh selama masa kuliah sehingga teori-teori yang dipelajari dapat diterapkan pada masalah-masalah yang relevan.

Secara praktis, penulis berharap penelitian ini dapat berfungsi sebagai sumber informasi dan referensi bagi mereka yang ingin memahami lebih mendalam tentang peran Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintahan Daerah, dan *Leverage* dalam mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penda untuk berkontribusi lebih dalam pembangunan ekonomi dan memenuhi kebutuhan daerah, guna memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat serta meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pajak daerah.

#### **1.5 SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI**

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat dari penelitian ini.

##### **BAB II : TELAAH PUSTAKA**

Bab ini membahas tentang teori yang menjadi dasar pemecahan masalah selama penyusunan skripsi, landasan teori, penelitian terdahulu, hipotesis dan model analisis dari penelitian ini.

### BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang pendekatan penelitian, populasi dan sampel, identifikasi variabel, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data dan teknik analisis dari penelitian ini.

### BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang deskripsi objek penelitian, hasil analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji hipotesis dan pembahasan dari penelitian ini.

### BAB V : SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN

Bab ini berisi kesimpulan, saran dan keterbatasan dari hasil penelitian dan juga saran dari penelitian ini.